

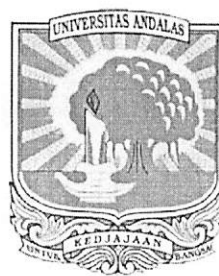
Abstrak

SEMINAR NASIONAL II

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk
Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia”**

Padang, 28-29 September 2016



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Sekretariat : Fisip Unand Kampus Limau Manis Padang , Tlp (0751) 71266

Website: <http://fisip.unand.ac.id>, e-mail : semnas2fisip@gmail.com

Abstrak

**SEMINAR NASIONAL II
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora
Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Copyright @ 2016
1-123 halaman, 21 x 29 cm
ISBN: 978-602-71540-6-3

Penyunting
Andri Rusta
Sadri
Zulfadli

Lay Out
Binuang Sati.

Diterbitkan oleh:
Gedung Dekanat, FISIP Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang
Telp/faks. 0751-71266
Website: <http://fisip.unand.ac.id>
email: semnas2fisip@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA	11
RUNDOWN ACARA	13
JADWAL PRESENTASI SESI PARALEL	15
PELAYANAN PUBLIK	27
☞ PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA: STUDI PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT <i>Fernandes Simangunsong</i>	29
☞ STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN <i>PUBLIC SERVICE 21ST</i> PERSPEKTIF <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA <i>Andi Pitono, Ismail Nurdin</i>	29
☞ ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS <i>Roza Liesmana</i>	30
☞ <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL</i> BIROKRASI DI INDONESIA: PERBEDAAN <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION</i> PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU <i>Wayu Eko Yudiatmaja, Tri Samnuzulsari</i>	31
☞ TINJUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT <i>Kusdarini</i>	31
☞ ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG: STUDI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL TRANS PADANG <i>Edo Oksudi, Aldri Frinadi</i>	33
☞ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENKOMUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER <i>Abdullah, Ady Muzwardi, Arif Rahman Majid</i>	33
☞ INNOVATION OF PUBLIC SERVICES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY <i>Anne Friday Safaria</i>	34
☞ STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR: SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH <i>Ria Ariany</i>	34
☞ PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL PARA PEJABAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI <i>Hamirul</i>	35



3	PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN BERBASIS <i>STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> <i>Suswanta</i>	101
3	OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM: STUDI OPTIMALISASI POTENSI SUMATERA BARAT DALAM KERJASAMA <i>INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION</i> (IORA) <i>Apriwan, Silsila Asri, Wiwik Rukmi</i>	102
3	KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES) <i>Busyra Azheri</i>	103
3	MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI: SUATU STUDI PENDAHULUAN <i>Roni Ekha Putera</i>	104
3	DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA? <i>Hendri Koeswara, Simson Ginting</i>	105
3	DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN <i>Desna Aromatica</i>	105
3	RELASI PEMERINTAH DAN PETANI: PENGALAMAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG <i>Husni Kamil Manik, Didi Rahmadi</i>	106
3	PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA DEPAN: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFFSDFSFSFS4235466558888////////L.	
	PEMILU DAN PARLEMEN	107
3	IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM: STUDI KPU PROVINSI RIAU <i>Dewi Silvia Ariani</i>	109
3	E-DEMOKRASI UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN DI SUMATERA BARAT <i>Aidinil Zetra</i>	109
3	ANALISA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL <i>Ira Novita</i>	110
3	AKUNTABILITAS POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP PEMILU LEGISLATIF 2014 <i>Andri Rusta</i>	111
3	PEMASALAHAN-PEMASALAHAN PEREKRUTAN PENYELENGGARAN PEMILU: ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM <i>Etwin Juanda</i>	111
3	DINAMIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU PERIODE 2014-2019 PASCA PENETAPAN MENJADI PASANGAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015 <i>Alexsander Yandra</i>	114



dianalisis sesuai dengan prinsip metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Berdasarkan elemen sea power tersebut dapat digambarkan Sumatera Barat memiliki posisi yang strategis dan kondisi pantai yang cocok untuk kota pelabuhan, karakteristik populasi sebagai pelaut sekaligus pedagang, serta pemerintah lokal yang terus berupaya untuk mengembangkan kota menjadi enterprenurial city. Dalam konteks ini, Sumatera Barat, khususnya wilayah pesisir baratnya memiliki potensi daya saing untuk dikembangkan dalam kerangka kerjasama IORA seperti keamanan, investasi, perdagangan dan bisnis, manajemen resiko bencana, budaya dan pariwisata, manajemen perikanan dan kerjasama dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kata kunci: *maritime, sea power, local, regional cooperation, indian ocean*

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)

Busyra Azheri

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 371 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat urgensi dari Bum Des ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pendirian dan pengembangan BUM Des. Namun demikian masih terdapat persoalan berkaitan dengan bentuk badan hukum BUM Des yang berimplikasi pada sumber permodalannya. Selain itu perlu dipahami bahwa BUM Des merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa atau nagari di Sumatera Barat yang pendirian dan pelaksanaan kegiatannya ditujukan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa/nagari. BUM Des atau BUM Nag dalam aktivitasnya dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Untuk itu perlu suatu konsep kelembagaan BUM Des atau BUM Nag yang sejalan dengan karakteristik Nagari yang ada di Sumatera Barat.

Keywords: *kewenangan pemerintahan desa/ nagari, badan usaha milik desa*